

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan manusia saat ini sangat diperlukannya diantaranya mencakup daya berpikir, penalaran, daya fisik, dan menguasai ilmu pengetahuan-teknologi serta olahraga dan seni sehingga diharapkan akan bisa menghasilkan manusia yang sanggup dan mampu untuk berperan aktif, terutama saat ini dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tumbuh secara cepat dan menyebar secara global.

(Pratama, 2018) menyebutkan bahwa pada tahun ajaran 2016/2017 yang lalu, ada sekitar dua ratus ribu sekolah dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang beroperasi di tanah air. Sekolah sekolah tersebut mempunyai total siswa yang sangat banyak, mencapai 45 juta siswa. Hal ini karena kebutuhan akan pendidikan yang bermutu semakin meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan semakin majunya perekonomian sebuah negara. Selain itu jenis pendidikan yang dibutuhkan masyarakat juga semakin variatif seiring dengan semakin majunya masyarakat tersebut. Bisnis pendidikan juga dikenal memiliki daya tahan yang tinggi. Berbeda dengan bisnis lain yang sangat mudah terpengaruh oleh iklim perekonomian, bisnis di bidang pendidikan umumnya jauh lebih stabil karena pendidikan selalu menjadi prioritas orang tua untuk masa depan anak-anaknya.

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya produktif dan kreatif oleh seluruh komponen bangsa, agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: "Pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Dunia pendidikan yang semakin berkembang menuntut setiap lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutunya. Peningkatan mutu sekolah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah. Mengingat persaingan dunia



pendidikan begitu besar, maka tuntutan masyarakat terhadap mutu sekolah sudah menjadi pilihan yang tidak bisa ditawar (Yohamintin et al., 2021). Para pelajar sebagai generasi yang dipercaya meneruskan bangsa dituntut untuk terbuka dalam menyikapi perubahan, mampu bagaimana cara belajar dengan baik, memiliki keterampilan yang memadai, mudah untuk dilatih ulang, serta mempunyai karakter yang cukup kuat untuk berkembang di masa depan (Amin, 2017). Pendidikan vokasi dimana lebih ditekankan untuk bisa memiliki keahlian dalam praktikal yang nantinya sangat dibutuhkan di dunia kerja. Secara spesifik, pendidikan vokasi bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia profesional dengan keterampilan kerja tinggi (Pratiwi et al., 2021).

Sebagaimana diperlukannya Pendidikan Vokasi di Indonesia, maka pemerintah Indonesia telah membentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk bisa menyikapi dan menghadapi tantangan global melalui Peraturan Presiden No 82 tahun 2019 tentang adanya Ditjen Pendidikan Vokasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Presiden, 2019). Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Kemdikbud, 2020) merupakan salah satu Lembaga di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Bapak Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi bekerjasama dengan kelembagaan yang dibentuk pada oleh yaitu Dunia Usaha dan Dunia Industri yang biasa dikenal sebagai DUDI.

Pada tahun 2015 tercatat Indonesia memiliki 55 juta tenaga kerja terampil (OECD, 2015). Berdasarkan perkiraan dari Masterplan Percepatan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (MP3EI), jumlah tersebut masih akan naik dan dibutuhkan 113 juta tenaga kerja terampil hingga tahun 2030, karena penambahan rata-rata 3.2 juta per tahun. Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi sektor pendidikan dan pelatihan. Pendidikan vokasi tidak kalah untuk berkembang sangat cepat pada satu dekade terakhir ini, bisa terbukti dengan terjadinya peningkatan jumlah peserta didik baru pada bidang vokasi sebesar 158% tahun 2001 hingga 2010.

Namun, Jika dilihat dari sisi penyerapan lapangan kerja, berdasarkan dengan data Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) (BPS, 2020), tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK paling tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 13,35%, meningkat dibanding dengan Agustus 2019 (10,36 %). Selain itu, beberapa permasalahan maupun kendala yang dihadapi pendidikan vokasi yaitu terbatasnya keterlibatan DUDI, Tingkat pengangguran pendidikan vokasi tinggi, kompetensi SDM, kualitas lulusan,



pengembangan bidang keahlian, Porsi SMK dalam penerimaan mahasiswa nasional, dan Kebijakan di “pukul rata” antara universitas dengan politeknik perlu ditinjau ulang (Kebudayaan, 2020). Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berupaya mengadakan berbagai program Kerjasama dengan Lembaga lain dalam kurun tiga tahun ini, yang terhitung pada tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2022. Kerjasama merupakan proses sosial suatu kegiatan tertentu memiliki satu tujuan Bersama yang adanya saling membantu serta memahami kegiatan yang dijalankan, Abdul Syani (Santoso et al., 2018).

Pada Oktober 2020 (Nadia, 2020), Dirjen Pendidikan Vokasi mewajibkan Lembaga Pendidikan vokasi untuk dapat melaksanakan beragam jenis paket program yang mengacu upaya Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto mengatakan “agar dunia Pendidikan tidak terlalu tertinggal jauh dari perkembangan industri” maka diharapkan paket ‘*Link and Match*’ dapat terus berjalan secara berkesinambungan. Program Kerjasama ini pun tertera pada nota kesepahaman Kemendikbud dengan Kawasan ekonomi khusus (KEK) Singhasari tentang “Pengembangan Pendidikan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi” dan “Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pendidikan Vokasi” yang diresmikan di Malang, Jawa Timur (10/10) lalu. Dan Bapak Wikan kembali menegaskan “Pelaksanaannya menuntut keterlibatan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah daerah, industri, dan pengelola Lembaga Pendidikan dalam perencanaan maupun penerapannya.”

Pada November 2020 (Anonim, 2020) Direktur Dirjen Pendidikan Vokasi melakukan kunjungan terkait dalam program pengembangan SMKN 3 Pekanbaru, yang melihat secara langsung dan memastikan program kebijakan ‘*Link and Match*’ antara vokasi DUDI. Kegiatan yang diawali dengan menggelar *sharing* Bersama kepala sekolah dan para guru, dilanjutkan dengan pemakaian tanjak yakni lambing kebudayaan Riau, lanjut dengan mengadakan pameran siswa wirausaha yang memperlihatkan hasil produk unggulannya, kemudian berkunjung ke tempat uji kompetensi jurusan tata boga.

Pada Juni 2021 (Neneng Zubaidah, 2021), Kemendikbud Ristek Dirjen Pendidikan Vokasi, menegaskan Indonesia sedang membangun sebuah infrastruktur digital terpadu revolusi industri 4.0 yang bekerjasama dengan pemerintah Australia. Bapak Wikan mengatakan “Kami berharap dapat meningkatkan kualitas Lembaga



Pendidikan dan pelatihan vokasi khususnya untuk bidang keterampilan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) yang berkompeten, terampil, dan mampu berdaya saing dengan sesuai kebutuhan industri serta pertumbuhan wirausaha baru di bidang tersebut.” Dengan adanya kemitraan ini, melahirkan praktik dari Victorian Technical and Further Education (TAFE) dalam membangun sistem pembelajaran jarak jauh dan digital secara efektif untuk pelatihan dan pendidikan bagi siswa secara lebih luas dengan dapat menekan biaya yang rendah (Hanifah, 2021).

Pada Juli 2021 (Dian, 2021), Kemendikbud Ristek melalui Dirjen Pendidikan Vokasi meluncurkan program baru yang bernama ‘*Orange Knowledge Program (OKP): Tailor Made Training Plus (TMT+)*’ yang masih berkaitan dengan implementasi Kerjasama Indonesia dengan kerajaan Belanda dalam mengembangkan Pendidikan vokasi melalui SMK Pusat Keunggulan di bidang khusus yaitu Pertanian. Program ini pun didanai oleh pemerintah belanda lalu dipusatkan khusus untuk SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) melalui Nuffic Neso Indonesia yang memiliki komitmen mendukung perkembangan Pendidikan vokasi di Indonesia dan salah satu kompetensi keahlian di bidang pertanian ini adalah agribisnis tanaman pangan dan hortikultura serta agribisnis ternak unggas. Konsorsium yang ditunjuk, diantaranya yaitu Institut Pertanian Bogor, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPSMV) bidang pertanian Cianjur, Universitas Wageningen, Zone College, Van Hall Larenstein dan Holland Door. Untuk SMK yang ditunjuk, diantaranya yaitu SMKN 1 Karangtengah, SMKN 1 Wanareja, SMKN 1 Singgahan, SMK 3 Kuala Kapuas, SMKN 3 Penajam Paser Utara, SMKN PP Kalasey, SMK PP Negeri Padang, SMK Swasta SPP SNAKMA Muhammadiyah Tanjung Anom, SMKN 1 Gelumbang, dan SMKN 1 Pagaran.

Pada November 2021 (Anonim, 2021), Dirjen Pendidikan Vokasi penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Huawei di Huawei Supplier Convention Summit 2021. Bentuk Kerjasama ini merupakan wujud komitmen jangka Panjang oleh Huawei untuk menggelar program alih pengetahuan serta pemanfaatan fasilitas dan teknologi bagi SMK dan Politeknik. Melalui Kerjasama ini, Huawei Indonesia membuka kesempatan bagi Politeknik untuk dapat mengikuti program Huawei ICT Academy serta program sertifikasi bagi pengajar dan siswa.

Pada Januari 2022 (Jemadu, 2022), Dirjen Pendidikan Vokasi penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT LX International Indonesia, Asosiasi Game Indonesia (AGI), dan Cipta Karsa Adikarya (CAKRA). Kerjasama ini



merupakan bagian pengembangan gim lokal. PLT Direktur Kemitraan dan Penyeragaman DUDI, Saryadi berkata “Ruang lingkup ini paket lengkap, dimulai dari penyesuaian kurikulum, desain gim, hingga peningkatan kompetensi Pendidikan di bidang bisnis gim yang masih ada aktivitas lain di ‘*Link and Match*’.

Menurut (Disas, 2018) ‘*Link and Match*’ merupakan salah satu kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pernah ada dan dikembangkan untuk meningkatkan relevansi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri khususnya. Tetapi nampaknya perlu upaya yang lebih maksimal dari Kemendikbud dalam menambah keberadaan SMK pada bidang keahlian yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan tenaga kerja di daerah. Kebijakan link and match dianggap sebagai penggalian kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja pada masa yang akan datang yang diharapkan paradigma orientasi pendidikan tidak lagi supply minded tapi menjadi lebih demand minded (kebutuhan pasar). Kebijakan link and match terbagi menjadi dua sasaran, yaitu pada tingkat sekolah menengah, dan pada tingkat perguruan tinggi. Khususnya pada tingkat sekolah menengah, sasaran program pemerintah (DEPDIKNAS) mengubah proporsi siswa SMU vs SMK 70:30, menjadi 30:70. Sementara itu, pada tingkat perguruan tinggi diharapkan adanya peran industri untuk menciptakan pelatihan-pelatihan khusus bahkan bekerja sama untuk mendirikan institusi sesuai dengan jenis industri yang dikembangkan.

Pada Maret 2022 (Rosa, 2022), Dirjen Pendidikan Vokasi penandatanganan perjanjian kerjasama pengembangan program Diploma 4 Spesialisasi (Semester 7&8) Energi Terbarukan bidang Solar, Hydro, dan Hybrid dengan dukungan pemerintah Swiss yang mencakup untuk pengembangan kurikulum, modul pelatihan, kapasitas dosen, pranata laboratorium Pendidikan, sarana dan prasarana, magang dan kemitraan dengan DUDI. Kerjasama ini didanai oleh Swiss State Secretariat for Economics Affairs SECO dan dilaksanakan oleh GFA Consulting Group hingga Juni 2025 bersama politeknik yang ditunjuk, yaitu Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Manado dan Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan gelar Sarjana Teknik Terapan bidang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Tujuan utama program ini adalah menciptakan tenaga kerja yang berkompeten di bidang perencanaan, disain, pembangunan dan pemasangan, inspeksi dan *commissioning*, supervisor, pengoperasian dan pemeliharaan PLTS, PLTS Hybrid Diesel, serta PLTA.

Dengan banyaknya program Kerjasama yang dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi dalam kurun tiga tahun ini. Dan minimnya informasi akan siapa nama pengelola yang dimaksudkan berasal dari pemerintah daerah, industri, dan pengelola Lembaga Pendidikan tersebut yang telah disinggung pada program di bulan Oktober 2021. Maka diperlukan Tata Kelola yang baik demi kelancaran satu tujuan Bersama. Tata Kelola secara umum merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tindakan bersifat dapat mengarahkan, mengendalikan urusan publik dengan memiliki tujuan supaya dapat mewujudkan nilai-nilai tersebut di bidang yang ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat dalam intervensi pemerintah atas kepentingan, Sedarmayanti (Sadubun, 2019).

Tata Kelola yang baik, tidak hanya harus memiliki sebuah transparansi sesuai dengan yang telah dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi seperti membuat berita supaya program yang dijalankan dapat dikenal dan diketahui publik, Namun, itu semua belum cukup. Terutama belum tersedianya informasi yang memadai dan kepastian akan bagaimana bentuk Partisipasi, Responsibilitas, Akuntabilitas, Keadilan dan Independen yang masih perlu ditambahkan sebagai bagian kecil untuk diketahui bahwa itulah bukti nyata program yang telah dilakukan apakah sudah baik dan sesuai, tanpa ada campur tangan pihak lain di luar yang diberikan kewenangan.

Permasalahan yang di angkat di dalam penelitian ini dari sisi Tata Kelola diantaranya yaitu 3 pilar utama, terdiri atas Akuntabilitas, Transparansi dan Tanggung Jawab. Untuk permasalahan dalam Kerjasama Kelembagaan yang dilakukan pun belum adanya keterangan informasi lebih lanjut akan bagaimana proses awal, proses mencari sponsor maupun faktor lainnya seperti Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan serta Evaluasi yang akan diterapkan sebelum dilakukannya sebuah Kerjasama dengan Lembaga lain salah satunya dengan Lembaga DUDI. Maka dari itu, adanya penelitian ini hal yang sudah disebutkan diatas perlu dilakukan pengkajian informasi dan data secara mendalam agar dapat terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan dan berujung menghambat program yang telah dijalankan.

Dilihat dari apa yang sudah dipaparkan pada Latar Belakang Masalah tersebut, maka penulis mengambil penelitian berjudul, “Analisis Mekanisme Tata Kelola dan Kerjasama Kelembagaan Di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri”.



## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas pada Tata Kelola Mitra Dudi?
2. Bagaimana Transparansi pada Tata Kelola Mitra Dudi?
3. Bagaimana Partisipasi pada Tata Kelola Mitra Dudi?
4. Bagaimana Alur Manajemen Kerjasama Kelembagaan Mitra Dudi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan runtutan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Penerapan Akuntabilitas pada Tata Kelola Mitra Dudi?
2. Untuk mengetahui Penerapan Transparansi pada Tata Kelola Mitra Dudi?
3. Untuk mengetahui Penerapan Partisipasi pada Tata Kelola Mitra Dudi?
4. Untuk mengetahui Alur Manajemen Kerjasama Kelembagaan pada Mitra Dudi?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ada dalam Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, Diharapkan dari Penelitian ini dapat memiliki kegunaan dalam bidang Pendidikan dengan topik yang diteliti, dijadikan acuan sebuah referensi bahan wacana belajar, agar bisa dilakukan penelitian selanjutnya dan dapat diimplementasikan sebagai ilmu dalam proses perkuliahan.
2. Manfaat Praktis, Diharapkan agar dapat mengupayakan pemberian dan penyempurnaan informasi terbaru dalam tata kelola yang diterapkan atau sedang dijalankan serta alur manajemen kerjasama kelembagaan yang baik di masa depan.

## **1.5 Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti membatasi pokok pembahasan permasalahan. Dan guna memperoleh suatu Batasan masalah yang jelas, sebagai berikut Pembatasan masalah meliputi:

1. Penelitian yang dilakukan khusus pada Mitra Dudi.
2. Objek yang diambil dan diteliti yaitu Tata Kelola dan Kerjasama.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Pada pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan agar dapat mempermudah dalam proses penyusunan. Dibawah ini bentuk dari sistematika penulisan skripsi yang disusun, sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penjelasan dari BAB I Pendahuluan ini berisikan cangkupan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan dan Manfaat dalam Penelitian, dilengkapi dengan Batasan masalah dan Sistematika Penulisan Skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Penjelasan dari BAB II Tinjauan Pustaka ini berisikan cangkupan literatur yang mendasari topik penelitian yang sudah dipilih, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran pada penelitian ini.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Penjelasan dari BAB III Metodologi Penelitian ini berisikan cangkupan dari Desain Penelitiannya, Tahapan Penelitian, Waktu dan Tempat Penelitian, serta Metode Analisis.

### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Penjelasan dari BAB IV Analisis dan Pembahasan ini berisikan cangkupan dari hasil yang sudah di analisis serta pembahasan yang dimulai dari profil perusahaan, struktur, dan membahas hasil analisis data dari penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Penjelasan dari BAB V Penutup ini berisikan keseluruhan penelitian yang diambil kesimpulannya dan implikasi manajerial bagi perusahaan maupun peneliti,